

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan tingkat kemakmuran negara didunia terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang akan menuju negara maju, dalam menentukan kategori tersebut terdiri dari beberapa indikator. Salah satu yang digunakan untuk mengkategorisasikan suatu negara dengan UNDP (*United National Development Program*) dengan konsep HDI (*Human Development Index*), suatu negara akan dikategorikan sebagai negara maju jika HDI-nya mencapai 80-100. IPM atau HDI merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Handalani, 2019). Sedangkan saat ini Indonesia berdasarkan data BPS yang rilis pada 26 Februari 2020 mencapai 71,92 sehingga Indonesia memiliki harapan untuk dapat mencapai indeks negara maju melalui HDI (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020).

Kondisi saat ini Indonesia masih menyisakan berbagai masalah yang belum terselesaikan dengan tuntas, misalnya: kemiskinan, konflik horizontal, peredaran narkoba, terorisme, kekerasan sosial, dan berbagai bentuk kriminal lainnya. Jika Indonesia gagal menyiapkan kesmepatan ini, maka bisa dipastikan akan menjadi beban dan permasalahan seperti pengangguran besar-besaran, yang akan meningkatkan kriminalitas dikalangan masyarakat, tingkat kemiskinan meningkat,

kemunduran mental, pertumbuhan ekonomi terhambat, standar kualitas kehidupan menurun dan kesejahteraan semakin menurun. Mengelola sumber daya manusia agar lebih produktif akan mendorong perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia diawal tahun 2020 ini semakin meningkatkan kelemahan ekonomi, banyak usaha yang gulung tikar dan PHK besar-besaran. Menurut data Badan Pusat Statistika Republik Indonesia (2020), dengan judul Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020 No. 40/05/Th.XXIII, 05 Mei 2020 menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen.

Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. Dari data di atas menunjukkan bahwa penambahan jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat selaras dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi karena bonus demografi, untuk mengurangi kegagalan bonus demografi dan perekonomian negara dikala pandemi, pemerintah telah meluncurkan program bantuan pelatihan untuk masyarakat melalui kebijakan Program Kartu Prakerja. Sebagaimana kutipan dimuat oleh media online Merdeka.com (2020), sebagai berikut:

Dengan judul berita “Implementasi Kartu Prakerja Dimulai di Daerah Terdampak Virus Corona”. Jumat, 20 Maret 2020 17:02. Reporter: Merdeka.

Diakses: Kamis, 20 Mei 2021 15:02. Pemerintah resmi merilis Program Kartu Prakerja. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan peluncuran program ini bentuk realisasi janji Presiden Joko Widodo di masa kampanye lalu; “Kartu Prakerja ini janji Presiden dan kami buat desain terbaik untuk di implementasikan”, kata Moeldoko di kantor kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (20/3). Moeldoko menegaskan program ini bukan menggaji pengangguran, melainkan program pemberian pembiayaan untuk mendapatkan pelatihan kerja. Mantan Panglima TNI ini mengatakan Program Kartu Prakerja berperan mendorong para pesertanya untuk memiliki keahlian sebagai pekerja dan berwirausaha. Sebab, banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja berpengalaman dan memiliki keahlian. “Kalau mereka tidak dikasih pelatihan nanti tidak dapat kerja, maka kita bikin kartu kerja”, kata Moeldoko. (<https://www.merdeka.com/uang/implementasi-kartu-pra-kerja-dimulai-di-3-daerah-terdampak-virus-corona.html> diakses pada 20 Maret 2021)

Program Kartu Prakerja adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk peningkatan kompetensi kerja, kualitas untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan secara insentif dengan menggunakan metode pelatihan. Program Kartu Prakerja adalah inovasi pelayanan publik dari pemerintah pusat dengan menggandeng mitra platform digital atau lembaga pendidikan online atau bimbingan belajar online (BIMBEL), serta mitra pembayaran virtual untuk memberikan pelayanan dan pelatihan berbagai program siap kerja dengan harga yang terjangkau. Program Kartu Prakerja menjadi sebuah harapan bagi masyarakat yang terpaksa dirumahkan, dan sebagai harapan bagi masyarakat yang ingin memulai kerja namun tidak mempunyai keahlian di bidangnya, serta para pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang bisnisnya juga terpaksa gulung tikar karena perkembangan kebutuhan pasar.

Selanjutnya, pemerintah resmi meluncurkan program baru untuk masyarakat Indonesia yaitu Program Kartu Prakerja. Pada tanggal 11 April 2020 sesuai dengan

konsep awal yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, serta daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Awalnya, Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Namun, merebaknya pandemi Covid-19 membuat fungsi Program Kartu Prakerja menjadi lebih luas lagi, yakni sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi, sebagai penyelamat atau menjadikan masyarakat lebih bergantung pada pemerintah berupa bantuan. Program Kartu Prakerja ini mempunyai tujuan yakni pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya berbentuk pelatihan berbasis internet/aplikasi masing-masing peserta yang mendapatkan bantuan dan diberikan kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah dan mereka yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19. Sesuai dengan berita media online [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id) (2020), sebagai berikut:

Dengan judul berita “Manfaat Program Kartu Prakerja Menuju Indonesia Maju”. Minggu, 16 Agustus 2020 08.00 WIB. Diakses: 12 Januari 2022 19.07 WIB. Reporter: Adv Team. Editor: Ridwan Prima Gozal. Pemerintah resmi meluncurkan Program Kartu Prakerja pada 11 April 2020. Sesuai konsep awal yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing SDM Indonesia. Awalnya, Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan SDM unggul yang menjadi prioritas pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 membuat fungsi Program Kartu Prakerja menjadi lebih luas lagi, yakni sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi. Program Kartu Prakerja menjadi sekoci bagi masyarakat yang terpaksa dirumahkan karena perusahaan tempat mereka bekerja terkena dampak pandemi serta pelaku UMKM yang bisnisnya juga terdampak

pandemi. Program ini memberikan secercah harapan untuk bangkit menuju Indonesia maju. (<https://adv.kontan.co.id/news/manfaat-kartu-prakerja-menuju-indonesia-maju> diakses pada 20 Maret 2019)

Program Kartu Prakerja ini sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Program Kartu Prakerja menjadi kebijakan yang mendukung masyarakat miskin belum bekerja, dengan memberikan pelatihan kerja dan bantuan insentif paska penelitian dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan yang ada di masyarakat, baik yang berada dibawah kementerian atau lembaga, maupun swasta.

Dengan judul berita: “4 Fakta Seputar Kartu Prakerja, dari peserta hingga nilai bantuan”. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Program Kartu Prakerja untuk mendukung pengembangan dan pembangunan SDM dengan alokasi anggaran Rp. 8-10 triliun, serta Program Kartu Prakerja di tahun 2020 akan diberikan kepada masyarakat sebanyak (2juta) penerima manfaat. Pemerintah telah membentuk satu lembaga pengelola atau *Project Management Office* (PMO) yang akan menangani semua tanggungjawab dari implemementasi Program Kartu Prakerja baik akses regular maupun digital yakni Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Pusbasari. Bantuan tersebut akan diberikan sebanyak 8 (delapan) kali yang terdiri dari biaya pelatihan senilai Rp. 1juta (1 kali), insentif pasca pelatihan senilai Rp. 600.000 (4 kali), insentif survei kebekerjaan senilai Rp. 50.000 (3 kali). Sehingga total bantuan yang didapat pemegang Kartu Prakerja adalah Rp. 3.550.000. Melalui mekanisme ini, masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital seperti Gojek, Tokopedia, dan masih banyak lagi. (<https://m.liputan.com/bisnis/read/4225040/4-fakta-seputar-kartu-prakerja-dari-peserta-hingga-nilai-bantuan> diakses pada 20 Maret 2021)

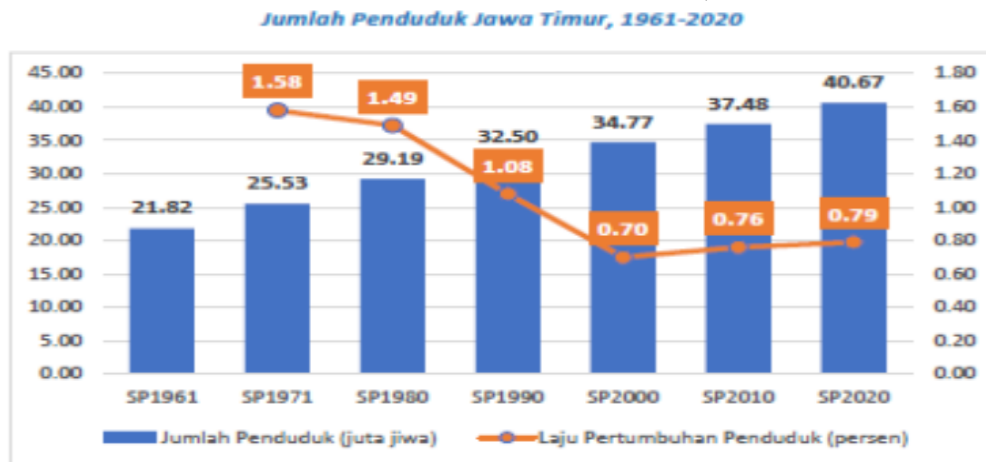
Sebagai bentuk jaminan sosial program kartu prakerja diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Program Kartu Prakerja dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan buku laporan Prakerja 2020, Program Kartu Prakerja menjangkau peserta di 514 kabupaten/kota. Penerima Program Kartu Prakerja terbanyak ada di

Pulau Jawa. Dengan rinciannya, meliputi: Jawa Barat sebanyak 793,4 ribu penerima, Jawa Timur sebanyak 651,5 ribu penerima, DKI Jakarta sebanyak 542,5 ribu penerima, Jawa Tengah sebanyak 450 ribu penerima (Liputan6.com, 2020).

Seperti yang dikatakan oleh pemerintah pusat, bahwa Provinsi Jawa Timur akan di ujicobakan untuk menerapkan Program Kartu Prakerja, maka dari itu data yang ada di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.572,73 ribu jiwa (11,40%), berkurang sebesar 13,24 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 4.585,97 ribu jiwa (11,46%). Persentase penduduk miskin pada Maret 2021, menurun 0,06% dari bulan September 2020.

Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin meningkat 0,01%, dari 8,37% pada bulan September 2020 menjadi 8,38% pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebesar 15,16%, turun menjadi 15,05% pada Maret 2021 (menurun 0,11%). Secara umum, pada periode Maret 2011-Maret 2021 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan kecuali pada September 2013 dan Maret 2015, antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya sejak periode Maret 2020 sampai September 2020, kemiskinan mengalami peningkatan di Jawa Timur.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Jawa Timur, 1961-2020



Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Timur (2021) Sensus Penduduk 2020

Hasil gambar diatas menunjukkan jumlah penduduk Jawa Timur dengan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebesar 40,67 juta orang. Jawa Timur masih dalam masa bonus demografi karena 71,65% penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun). SP2020 mencatat penduduk Jawa Timur pada bulan September 2020 sebesar 40,67% juta orang, jumlah penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan sensus sebelumnya. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Jawa Timur mengalami penambahan sekitar 3,19 juta jiwa atau rata-rata 0,32 juta jiwa setiap tahun.

Dengan judul berita: “Implementasi Kartu Prakerja Berupa Pelatihan dan Sertifikasi”. Merdeka.com. Jumat, 20 Maret 2020 17.02 WIB. Reporter: Merdeka. Diakses pada: Kamis, 20 Mei 2021 15.02 WIB. Pemerintah Jokowi telah meluncurkan Program Kartu Prakerja. Program ini dibuat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja baru maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Penerapan program kartu prakerja rencananya akan dilaksanakan di tiga daerah awal yang secara perekonomian paling terdampak covid-19, yakni Bali, Manado dan Riau. Staf Ahli Menko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudy mengatakan pasca ketiga daerah tersebut, implementasi selanjutnya akan dilakukan di wilayah yang dianggap siap seperti Surabaya. “Implementasi kartu prakerja ini akan dimulai di 3 lokasi terdampak, yakni Bali, Manado dan Riau. Lalu langsung dilanjutkan di Surabaya dan kota-kota lainnya”, ujar Edi dalam sesi telekonferensi yang

digelar HIPMI, Jumat (20/3). Edi melanjutkan Program Kartu Prakerja ini juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pekerja yang terdampak PHK, terutama akibat covid-19 saat ini. “Saat ini pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu prakerja oleh pekerja yang terdampak PHK, terutama di sektor pariwisata dan industri pengelolaan”, sambung Edi. Dia menyatakan, pemerintah akan terus menampung usulan-usulan kebijakan yang dapat langsung berdampak pada perputaran roda ekonomi di tengah masalah covid-19. Khususnya untuk melindungi tingkat daya beli masyarakat. “Dengan menjaga daya beli kita, kita bisa jatuh tidak terlalu dalam seperti 1998, dimana kita lepas dari sisi kendali daya beli masyarakat sehingga timbul multikrisis”, tukas dia. (<https://www.merdeka.com/uang/implementasi-kartu-pra-kerja-dimulai-di-3-daerah-terdampak-virus-corona.html> diakses pada 20 Maret 2021)

Berita diatas menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini sudah mengatakan uji coba yang akan melaksanakan program bantuan berupa pelatihan kerja yang termuat pada Program Kartu Prakerja yakni Kota Surabaya, karena perekonomian Kota Surabaya paling terdampak pandemi Covid-19 dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu Kota Surabaya beserta masyarakat siap menjadi penerima manfaat Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja baru maupun korban PHK, terutama di sektor pariwisata dan industri pengelolaan.

Tabel 1.1. TPT Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2019	2020	2021
Jawa Timur	3,92	5,84	5,74
Kabupaten Bangkalan	5,84	8,77	8,07
Kabupaten Banyuwangi	4,08	5,34	5,42
Kabupaten Blitar	3,11	3,82	3,66
Kabupaten Bojonegoro	3,70	4,92	4,82
Kabupaten Bondowoso	2,96	4,13	4,46
Kabupaten Gresik	5,54	8,21	8,00
Kabupaten Jember	3,80	5,12	5,44
Kabupaten Jombang	4,39	7,48	7,09
Kabupaten Kediri	3,68	5,24	5,15
Kabupaten Lamongan	4,00	5,13	4,90
Kabupaten Lumajang	2,81	3,36	3,51



Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Madiun	3,62	4,80	4,99
Kabupaten Magetan	3,08	3,74	3,86
Kabupaten Malang	3,82	5,49	5,40
Kabupaten Mojokerto	3,68	5,75	5,54
Kabupaten Nganjuk	3,22	4,80	4,98
Kabupaten Ngawi	3,70	5,44	4,25
Kabupaten Pacitan	0,95	2,28	2,04
Kabupaten Pamekasan	2,32	3,49	3,10
Kabupaten Pasuruan	5,42	6,24	6,03
Kabupaten Ponorogo	3,58	4,45	4,38
Kabupaten Probolinggo	3,88	4,86	4,55
Kabupaten Sampang	2,81	3,35	3,45
Kabupaten Sidoarjo	4,72	10,97	10,87
Kabupaten Situbondo	2,82	3,85	3,68
Kabupaten Sumenep	2,17	2,84	2,31
Kabupaten Trenggalek	3,43	4,11	3,53
Kabupaten Tuban	2,76	4,81	4,68
Kabupaten Tulungagung	3,36	4,61	4,91
Kota Batu	2,48	5,93	6,57
Kota Blitar	4,64	6,68	6,61
Kota Kediri	4,22	6,21	6,37
Kota Madiun	4,01	8,32	8,15
Kota Malang	6,04	9,61	9,65
Kota Mojokerto	2,65	6,74	6,87
Kota Pasuruan	5,06	6,33	6,23
Kota Probolinggo	4,41	6,70	6,55
<b>Kota Surabaya</b>	<b>5,87</b>	<b>9,79</b>	<b>9,68</b>

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Indikator dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus - Tahun 2016 Tidak cukup sampel untuk melakukan estimasi sampai level Kabupaten/Kota

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa TPT di Kota Surabaya tahun 2019 sebesar 5,87%, selanjutnya di tahun 2020 naik 9,79%, kemudian turun di tahun 2021 sebanyak 9,68% (turun sebesar 0,11%). Sehingga dari hasil akhir TPT Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menduduki peringkat kedua di tahun 2021

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,68%. Berikut rincian UMR Surabaya terbaru (UMK Surabaya 2021) beserta 37 daerah lainnya diseluruh Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 1.2. Rata-Rata UMR di Wilayah Provinsi Jawa Timur 2021

<b>Rata-Rata UMR di Wilayah Provinsi Jawa Timur 2021</b>	
<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>UMK/UMR</b>
<b>Kota Surabaya</b>	<b>Rp 4.300.479,19</b>
Kabupaten Gresik	Rp 4.297.030,51
Kabupaten Sidoarjo	Rp 4.293.581,85
Kabupaten Pasuruan	Rp 4.290.133,19
Kabupaten Mojokerto	Rp 4.279.787,17
Kabupaten Malang	Rp 3.068.275,36
Kota Malang	Rp 2.970.502,73
Kota Pasuruan	Rp 2.819.801,59
Kota Batu	Rp 2.819.801,59
Kabupaten Jombang	Rp 2.654.095,88
Kabupaten Probolinggo	Rp 2.553.265,95
Kabupaten Tuban	Rp 2.532.234,77
Kabupaten Lamongan	Rp 2.488.724,77
Kota Mojokerto	Rp 2.481.302,97
Kabupaten Jember	Rp 2.355.662,91
Kota Probolinggo	Rp 2.350.000,00
Kabupaten Banyuwangi	Rp 2.314.278,87
Kota Kediri	Rp 2.085.924,76
Kabupaten Bojonegoro	Rp 2.066.781,80
Kabupaten Kediri	Rp 2.033.504,99
Kabupaten Tulungagung	Rp 2.010.000,00
Kabupaten Blitar	Rp 2.004.705,75
Kota Blitar	Rp 2.004.705,75
Kabupaten Lumajang	Rp 1.982.295,10
Kabupaten Pacitan	Rp 1.961.154,77
Kabupaten Ngawi	Rp 1.960.510,00
Kabupaten Bondowoso	Rp 1.954.705,75
Kabupaten Bangkalan	Rp 1.954.705,75
Kabupaten Nganjuk	Rp 1.954.705,75
Kabupaten Sumenep	Rp 1.954.705,76
Kota Madiun	Rp 1.954.705,77
Kabupate Madiun	Rp 1.951.588,16
Kabupaten Trenggalek	Rp 1.938.321,73
Kabupaten Situbondo	Rp 1.938.321,74
Kabupaten Pamekasan	Rp 1.938.321,75
Kabupaten Ponorogo	Rp 1.938.321,76

<b>Rata-Rata UMR di Wilayah Provinsi Jawa Timur 2021</b>	
<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>UMK/UMR</b>
Kabupaten Magetan	Rp 1.938.321,77
Kabupaten Sampang	Rp 1.938.321,78

Sumber: Kompas.com (2021)

Dari hasil tabel di atas, TPT di Kota Surabaya tahun 2021 sebagai perbandingan, rincian besar UMK 2021 untuk daerah tertinggi yaitu Surabaya sebesar Rp. 4.300.479,19, sedangkan UMK terendah ada di Sampang sebesar Rp. 1.913.321,73. Maka bisa dikatakan meskipun UMK Kota Surabaya menduduki peringkat satu, tetapi tingkat penganggurannya juga banyak karena tidak semua warga asli Kota Surabaya bekerja di kota kelahirannya, serta banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa adanya bantuan dari pemerintah lebih baik daripada mencari pekerjaan sendiri dengan cara memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2021), selama periode Maret 2020-Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya bertambah sebanyak 6,82 ribu jiwa dari 145,67 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 152,49 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 4,68%. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dalam rentang waktu satu tahun mengalami peningkatan sebesar 4,18% dari 5,02% pada Maret 2020 menjadi 5,23% pada Maret 2021.

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2021)

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota Surabaya selama periode Maret 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19
2. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan pandemi covid-19, masyarakat di Kota Surabaya banyak berdiam diri dirumah
3. Terjadi inflasi umum selama periode Maret 2020-Maret 2021 sebesar 1,23%
4. Pada periode Maret 2020-Maret 2021 terjadi kenaikan harga eceran makanan pokok, terlihat dari kenaikan indeks harga konsumen untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,89%

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis kemiskinan Kota Surabaya pada Maret 2021 adalah sebesar Rp. 611.466,00 per kapita / bulan. Dibandingkan Maret 2020, garis kemiskinan bertambah sebesar Rp. 19.329,00 per kapita / bulan. Garis kemiskinan

per rumahtangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumahtangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumahtangga pada Maret 2021 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 3.094.017,96 per rumahtangga / bulan, bertambah sebesar Rp. 330.772,03 per rumahtangga / bulan, dibanding kondisi Maret 2020 sebesar Rp. 2.763.245,93 per rumahtangga / bulan.

Berdasarkan rincian dan pembahasan diatas maka penulis mengambil pertimbangan urgensitas, sebagaimana menurut (Saumana et al., 2020) ada 3 (tiga) golongan yang perlu mendapat perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi, yaitu kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dan lapangan kerja. Sehingga melakukan kajian ketenagakerjaan menjadi suatu yang penting untuk menyumbang keberhasilan bonus demografi khususnya di era pandemi yang paling berpengaruh pada perekonomian negara serta perlu menjadi pertimbangan saat kita membahas tenaga kerja Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya.

Selain itu, tingkat pengangguran yang ada di Kota Surabaya tergolong tinggi di akibatkan adanya dampak dari pandemi covid-19 di tahun 2021 sehingga daya saing untuk masyarakat membeli barang lebih banyak dan persaingan kerja semakin meningkat untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian, Program Kartu Prakerja yang menggunakan anggaran negara, Program Kartu Prakerja ini sudah berlaku hingga gelombang 10 (bulan Oktober 2021) yang mungkin masih berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan oleh pemerintah karena target ekonomi saat pandemi menjadi kebijakan untuk lebih mendorong peningkatan produktivitas di era pandemi serta krisis ekonomi. Kebijakan ini menjadi rutinitas sehingga perlu

semakin dimaksimalkan penggunaannya dan memperkecil resiko yang ditimbulkan.

Program Kartu Prakerja sudah dijalankan oleh pemerintah daerah masing-masing, salah satunya Kota Surabaya dan sudah berjalan sesuai tujuan. Bukti yang terlihat saat ini masih dibukanya oleh Pemerintah Pusat untuk para calon pendaftar Program Kartu Prakerja sudah sampai pada tahap gelombang ke-23 ditahun 2022 (Ekon.go.id, 2020).

Pemerintah pusat mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membantu menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Mulai dari sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah hingga menyinergikan Program Kartu Prakerja dengan program Pemda lainnya. “Hal yang tak kalah penting adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang disabilitas. Dengan begitu mereka bisa mendaftar maupun mengikuti pelatihan secara daring,” ujar Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin, Kamis (10/12) di Semarang. Dengan judul berita “Sukseskan Kartu Prakerja, Sinergi Pusat dan Daerah Kian Diperkuat”. 10 Dec 2020 15:04. Sumber ekon.go.id. Diakses 29 Mei 2022, 13.15 WIB. (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/704/sukseskan-kartu-prakerja-sinergi-pusat-dan-daerah-kian-diperkuat> diakses pada 20 Maret 2021)

Berdasarkan potongan isi berita di atas dijelaskan bahwa pemerintah daerah diikut sertakan dan diharapkan untuk membantu pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk mencapai keberhasilan yang menjadi tujuan dari Pemerintah pusat telah mengaturnya berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, pada Pasal 28 tentang Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja, penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas dimasing-masing daerah, penyediaan data

kebutuhan tenaga kerja oleh industri didaerah dan fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya berupaya membantu para calon peserta yang kesulitan saat mendaftar. Mereka menyediakan blangko pendaftaran plus perangkat komputer untuk membantu calon peserta. "Blangko sudah ada. Silakan datang ke kantor," ujar Kadisnaker Dwi Purnomo kemarin. Dwi menegaskan, kantor buka seperti biasa sejak Senin hingga Sabtu. Selain blangko, disnaker juga menyediakan perangkat komputer bagi calon peserta. Peserta yang datang harus menaati protokol pencegahan Covid-19. Terutama *physical distancing*, memakai masker, dan mencuci tangan di tempat yang disediakan. Selain itu, Surabaya menjadi salah satu daerah yang terdampak Covid-19 paling besar di Jatim. Otomatis banyak pekerja yang harus dirumahkan atau bahkan terkena PHK. JawaPos.com. 13 April 2020. 18:07:56 WIB. Dengan judul berita "Pemkot Surabaya Sediakan Sarana Untuk Pendaftar Prakerja. Calon Harus Taati Protokol Pencegahan Korona". Diakses 29/Mei/2022. 13.15 WIB. (<https://www.jawapos.com/surabaya/13/04/2020/pemkot-surabaya-sediakan-sarana-untuk-pendaftar-prakerja/> diakses pada 20 Maret 2021)

Berita di atas menjelaskan bahwa dahulunya instansi bernama Disnaker yang sekarang menjadi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja mendukung serta memberikan tempat, pelayanan, dan fasilitas yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Kota Surabaya untuk dapat memaksimalkan peserta penerima (JawaPos.com, 2020). Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melaksanakan 2 point yang diamanahkan dari pemerintah pusat berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 pasal 28, yaitu: penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri didaerah dan fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Sikap dari pelaksana dalam hal ini penyiapan pendamping dari pemerintah daerah, dan manfaat lain yang diberikan wewenang untuk dapat memfasilitasi para penerima manfaat Program Kartu Prakerja, serta disisi pengaturan birokrasi tidak

dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga kebijakan Kementerian Perekonomian dalam mencapai keberhasilan Program Kartu Prakerja untuk peningkatan kompetensi kerja, kualitas untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan secara insentif dengan menggunakan metode pelatihan belum mencapai tujuan.

Selain kebijakan Program Kartu Prakerja juga memiliki relevansi dengan disiplin ilmu penulis yaitu kebijakan, yang menjadi salah satu dimensi Ilmu Administrasi Publik dan Implementasi kebijakan adalah bagian dari tahapan kebijakan publik yang telah diajarkan selama penulis menempuh konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, maka penulis menuangkan analisa dalam karya tulis ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hasil implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil dari implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berjalan mencapai keberhasilan atau masih ada hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pelayanan publik tersebut.